

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengendalian intern merupakan sistem yang diperlukan untuk mengawasi kegiatan sebuah perusahaan. Dimana sistem tersebut dapat meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan dalam menilai hasil kinerja perusahaan.

Setiap perusahaan dapat melakukan aktifitas perusahaannya dan mencapai tujuan dengan adanya manajemen yang handal dalam melakukan proses perencanaan dan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan, sehingga mampu menetapkan kebijakan yang efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian terhadap aktivitas perusahaan yang baik, maka dapat diketahui pula bahwa sistem pengendalian intern perusahaan yang diterapkan oleh perusahaan telah memadai. Suatu sistem belum bisa dikatakan baik apabila tidak ada pengawasan dan pengendalian atas jalannya sistem tersebut, maka dari itulah diperlukan sistem pengendalian intern yang baik untuk memudahkan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kemungkinan terjadinya masalah perusahaan.

Suatu sistem pengendalian intern yang baik akan menghasilkan informasi yang benar dan dapat diterima oleh karyawan atau pimpinan perusahaan serta mampu memberikan pandangan atau gambaran yang jelas tentang keadaan aktiva yang perlu diawasi. Penerapan sistem pengendalian intern penerimaan kas sangat membantu

dalam memberikan informasi yang penting dalam pengambilan keputusan dan mengadakan ramalan tentang masa depan perusahaan serta kebijaksanaan perusahaan agar tidak terjadi penyelewengan kas. Dengan adanya sistem penerimaan kas yang baik, dapat menunjang keberhasilan kegiatan operasional suatu perusahaan.

Menurut Mulyadi:

**“Penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan, yang berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai, pelunasan piutang, atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan”.**<sup>1</sup>

Selain itu diperlukan perencanaan kas yang baik terhadap kas agar memudahkan manajemen dalam melakukan sumber penerimaan kas dan merancang pengeluaran yang terkoordinir. Sistem penerimaan kas berguna bagi manajer keuangan untuk menilai kinerja yang telah dicapai perusahaan.

Sistem pengendalian intern kas dirancang dengan baik terhadap struktur organisasi didalamnya terdapat pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi. Hal ini dilakukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan seperti pemisahan fungsi operasional, yaitu memisahkan fungsi penyimpanan dengan fungsi pencatatan. Sistem penerimaan kas sangat berguna bagi manajer keuangan untuk menilai kinerja yang telah dicapai perusahaan, yang pada umumnya dapat disajikan sebagai dasar dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen khususnya dalam pengendalian intern penerimaan kas. Sistem penerimaan kas yang

---

<sup>1</sup> Mulyadi, **Sistem Informasi**: Buku Satu, Edisi Empat: Selemba Empat, Jakarta 2016, hal. 379

lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak diteliti dan tidak andal serta efisiensi tidak terjamin.

PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan merupakan badan usaha yang menyediakan layanan tenaga listrik bagi masyarakat umum di Indonesia yang tujuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 1994 yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong kegiatan ekonomi, mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara juga tidak terlepas dari kegiatan penerimaan kas untuk menjaga kegiatan operasional perusahaan dan membiayai semua kegiatan operasional. Tujuan sistem pengendalian intern pada perusahaan atas penerimaan kas adalah menjaga harta kekayaan perusahaan dengan cara menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dan serta keandalan akuntansi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang ditetapkan. Penataan pengendalian intern perusahaan dapat meliputi sistem akuntansi yang baik dengan menciptakan prosedur-prosedur akuntansi yang dapat mencegah praktek-praktek dan penyelewengan perusahaan.

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara Penerimaan kas perusahaan berasal dari: Anggaran PLN (APLN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN), Pinjaman (Loan), Subsidi Pemerintah.

1. Anggaran PLN (APLN)

Anggaran PLN adalah rencana anggaran yang sumber danannya berasal dari anggaran PLN itu sendiri.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR dan ditetapkan paling lambat akhir bulan November tahun sebelumnya.

Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2013 tentang bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat telah dialokasikan dana subsidi listrik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau APBN-perubahan.<sup>2</sup>

3. Pinjaman (Loan)

Pemberian jasa oleh pihak satu kepada pihak yang lain dimana jasa tersebut dikembalikan dalam waktu tertentu bersamaan dengan uang sebagai bentuk balas jasa.

4. Subsidi Pemerintah

Subsidi Pemerintah adalah Bantuan, intensif, komoditas dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat, yayasan atau komunitas tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2013

<sup>3</sup> Pusdiklat SDA dan Konstruksi, 2017, Sumber dan Pola Pembiayaan Infrastruktur, [https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/09/69b38\\_MODUL\\_4\\_SUMBER\\_DAN\\_POLA\\_PEMBIAYAAN\\_INFRASTRUKTUR.pdf](https://bpsdm.pu.go.id/center/pelatihan/uploads/edok/2018/09/69b38_MODUL_4_SUMBER_DAN_POLA_PEMBIAYAAN_INFRASTRUKTUR.pdf), 2018

Kas yang dimiliki perusahaan sulit untuk dikendalikan pengolahannya secara efektif dan efisien. Ditambah lagi bilang keadaan perekonomian Negara kurang baik, sehingga tidak mendukung operasional perusahaan.

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara adalah perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan, yang kegiatannya adalah membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik untuk penerangan kehidupan masyarakat. Sebagai suatu perusahaan yang besar, membutuhkan kas yang besar juga sebagai sumber utama pendanaan modal kerjanya. Dengan menerapkan Sistem Pengendalian intern yang baik, akan dapat membantu pihak manajemen dalam hal memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu. Pihak manajemen akan dapat mengambil keputusan dengan menerapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pentingnya pengendalian intern penerimaan kas pada perusahaan maka penulis ingin mempelajarinya dan sekaligus menjadi acuan dalam melakukan penulisan skripsi yang berjudul: **“SISTEM PENGENDALIAN INTERN ATAS PENERIMAAN KAS PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA UTARA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya pasti akan menghadapi suatu permasalahan. Masalah yang sering dihadapi adalah keadaan yang menyimpang dari apa yang diharapkan, sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan dalam

mencapai tujuan. Menurut Sugiyono: **“Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data.”**<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang penulis di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana sistem pengendalian intern atas penerimaan kas pada PT PLN(Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

Untuk mengetahui sistem pengendalian intern atas penerimaan kas pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, serta menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama mengikuti perkuliahan sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis system pengendalian inter atas penerimaan kas.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

---

<sup>4</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D**, Cetakan ke -25: Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 35

**1. Bagi penulis**

Sebagai sarana pembelajaran, sarana latihan pengembangan kemampuan di dalam bidang penelitian, dan penerapan teori yang diperoleh dibangku kuliah, serta memberikan informasi tambahan untuk menambah wawasan untuk mengenal sistem pengendalian intern atas penerimaan kas dan penerapannya pada perusahaan.

**2. Bagi perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam menetapkan sistem dan prosedur dalam pengendalian penerimaan kas terkhusus pada bagian keuangan perusahaan.

**3. Bagi penelitian selanjutnya**

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan bahan informasi yang diperlukan tentang pengendalian intern atas penerimaan kas serta menjadi bahan acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya untuk lebih baik lagi.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Sistem Pengendalian Intern

##### 2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian intern

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi megecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong untuk dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian intern yang baik adalah mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, dan sumber daya yang memadai. Sistem pengendalian intern bukanlah sistem yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyelewengan yang terjadi. Fungsi pengendalian yang baik dengan berlandaskan pada sistem manajemen dan keuangan yang baik untuk menciptakan aktivitas dalam perusahaan menjadi lancar dan terkendali. Menurut Mulyadi bahwa: **“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”**.<sup>5</sup>

Menurut Mei Hotma Mariati Munte:

**“Sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (*interrelated*) satu sama lain dan berfungsi**

---

<sup>5</sup>Mulyadi, **Sistem Informasi**: Buku Satu, Edisi Empat: Selemba Empat, Jakarta 2016, hal 129



**secara bersama-sama agar tujuan yang sama (*Common Purpose*) dapat dicapai”.**<sup>6</sup>

Dari kedua defenisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sistem terdiri dari beberapa jaringan prosedur yang merupakan rangkaian atau perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjamin adanya keseragaman perlakuan terhadap satu sama lain untuk menjamin adanya keseragaman perlakuan terhadap satu sama lain transaksi di dalam suatu organisasi. Suatu sistem juga merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu sehingga sistem dapat berfungsi secara efektif dan efisien.

Sistem pengendalian intern seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersediannya informasi akuntan perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa peraturan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) mendefinisikan bahwa:

**“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.”**

Mulyadi mengemukakan bahwa:

---

<sup>6</sup> Mei Hotma Marianti Muntle, **Sistem Informasi Akuntansi**: Buku Satu, Edisi Pertama: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, hal. 1

**“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset oganisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Defenisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut di atas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.”<sup>7</sup>**

Menurut Standar Auditing dikutip dari Victor H. Sianipar dan Danri T. Siboro:

**Pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan berikut ini: keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektifitas dan efisien operasi<sup>8</sup>**

Menurut Mei Hotma Mariati: **“Sistem Pengendalian intern merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan rangkaian tindakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.”<sup>9</sup>**

Pengendalian intern mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan operasi perusahaan. Pengendalian intern mencakup sruktur organisasi dan seluruh metode yang terkoordinasi dalam sebuah perusahaan untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi serta mendorong setiap pihak dalam organisasi untuk dapat mematuhi semua kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern yang baik akan menjamin keamanan kekayaan investor atau kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasikan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

---

<sup>7</sup> Mulyadi, **Op.Cit.**,hal.129

<sup>8</sup> Victor H. Sianipar dan Danri T. Siboro, **Auditing II**, DIKTAT, Hal.1

<sup>9</sup> Mei Hotma Mariati Muntle, **Op. Cit.**, hal. 130

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern adalah sebuah sistem yang dibuat perusahaan untuk mengawasi dan melindungi aktiva perusahaan, prosedur-prosedur keuangan dan pencatatan-pencatatan guna mendapatkan kecermatan dan ketelitian data akuntansi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah sesuai.

### 2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi tujuan pengendalian intern yaitu

1. **Menjaga aset organisasi**
2. **Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi**
3. **Mendorong efisiensi**
4. **Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.**<sup>10</sup>

Sistem pengendalian intern yang baik harus mempunyai struktur pengendalian intern yang baik pula, yaitu harus mempunyai prosedur dan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas disini dimaksudkan bahwa struktur pengendalian intern suatu perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan cukup kepastian akan sasaran dan tujuan perusahaan yang dicapai.

### 2.1.3 Komponen Pengendalian Intern

Menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO) dikutip dari Hery: **“pengendalian intern terdiri dari lima komponen yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi, serta pemantauan.”**<sup>11</sup>

#### A. Lingkungan Pengendalian

---

<sup>10</sup> Mulyadi, *Op.Cit.*, hal.129

<sup>11</sup> Hery, *AUDITING I: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*: Prenademia Group, Jakarta, 2015, hal. 87

Lingkungan pengendalian intern terdiri dari prosedur, kebijakan, dan tindakan yang menunjukkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara menyeluruh tentang pengendalian intern serta arti pentingnya bagi entitas. Sub Komponen dari pengendalian intern terdiri dari:

1. Integritas dan Nilai-Nilai Etis

Meliputi tindakan manajemen untuk mencegah karyawan melaksanakan tindakan yang tidak benar, melanggar hukum, dan tidak beraturan.

2. Komitmen pada Kompetensi

Meliputi peninjauan manajemen tentang persyaratan keahlian yang harus dipenuhi oleh pekerja tertentu.

3. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan komisaris menggantikan pemegang saham dalam memantau jalannya kegiatan entitas yang dilaksanakan atau diatur manajemen. Komite audit juga berkewajiban untuk melaksanakan komunikasi secara periodik dengan auditor internal maupun auditor eksternal, termasuk menyetujui jasa audit dan non audit yang dilaksanakan oleh para auditor eksternal.

4. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Bertanggung jawab dalam memberi isyarat tertentu bagi para karyawannya tentang arti penting pengendalian internal

5. Struktur Organisasi

Memperlihatkan tingkat tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam setiap divisi.

## 6. Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia

Karyawan yang tidak sesuai dengan keahliannya atau tidak jujur dapat merusak sistem, walaupun ada banyak pengendalian yang telah diterapkan.

### B. Penilaian Resiko

Tindakan yang dilaksanakan oleh manajemen untuk mengidentifikasi dan menelaah risiko terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

### C. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur untuk membantu menyakinkan bahwa tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi resiko sudah diambil untuk mencapai tujuan entitas.

Kebijakan dan prosedur ini terdiri dari:

#### 1. Pemisahan Tugas

Ada dua bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas yaitu:

1. pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda juga;
2. harus ada pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aktiva dan karyawan yang menangani langsung aktiva secara fisik.

#### 2. Otoritas yang Tepat atas Transaksi

Supaya pengendalian berjalan dengan semestinya, setiap transaksi harus diotorisasikan dengan tepat.

#### 3. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Dokumen dan catatan merupakan objek fisik dimana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Dokumen harus ditandatangani oleh orang yang bertanggung

jawab atas terjadinya transaksi agar dapat diidentifikasi dengan mudah, serta dokumen juga harus bernomor urut tercetak.

#### 4. Pengendalian Fisik atas Aktiva dan Catatan

Pengendalian fisik, mekanik dan elektronik digunakan untuk melakukan pengendalian internal yang memadai.

#### 5. Pemeriksaan Independen atau Verifikasi Internal

Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan, dan pencocokan data yang sudah dipersiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda.

#### D. Informasi dan Komunikasi Akuntansi

Komponen ini bertujuan agar transaksi yang dicatat, diproses, dan dilaporkan telah memenuhi tujuan audit umum atas transaksi, yaitu: transaksi yang dicatat memang ada, transaksi yang sudah ada kemudian dicatat, transaksi yang sudah dicatat dinyatakan dalam jumlah benar, transaksi yang dicatat di-posting dan diikhtisarkan dengan tepat, transaksi diklasifikasikan dengan benar, dan transaksi dicatat pada tanggal yang benar.

#### E. Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkala oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sesuai yang diinginkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.

### 2.1.3 Unsur –Unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur sistem pengendalian intern merupakan bagian-bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya sistem pengendalian intern yang cukup memadai sehingga menciptakan data akuntansi yang dapat dipercaya.

Menurut Mulyadi unsur pokok sistem pengendalian intern adalah:

1. **Sruktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas**
2. **Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan dan beban.**
3. **Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.**
4. **Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya<sup>12</sup>**

Unsur-unsur pengendalian intern:

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.

Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan

---

<sup>12</sup> **Ibib**, hal. 130

dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aset perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa keuangan perusahaan.

- b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.

Dengan demikian dalam pelaksanaan suatu transaksi terdapat internal check diantara unit organisasi pelaksana. Dengan pemisahan fungsi akuntansi dari fungsi-fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, catatan akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memegang fungsi operasi dan fungsi penyimpanan.

- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam



organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.

- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat menurut Mulyadi yaitu:

- 1. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi sehingga pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.**
- 2. Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.**
- 3. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari orang atau organisasi lain.**
- 4. Perputaran jabatan (*job rotation*).**
- 5. Keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak.**
- 6. Secara periodik diadakan pencocokan fisik aset dengan catatannya.**

## **7. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain.<sup>13</sup>**

- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Di antara empat unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum, dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan.

## **2.2 Kas**

### **2.2.1 Pengertian Kas**

Kas adalah aset paling aktif dan memiliki dampak yang signifikan pada setiap transaksi. Memang, setiap transaksi yang dilakukan membutuhkan dasar penilaian, yaitu uang tunai. Meskipun estimasi kas tidak termasuk langsung dalam transaksi, nilai transaksi diukur dengan tunai.

Dalam kehidupan sehari-hari, kas hanya diartikan sebagai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran dan alat tukar. Berdasarkan pengertian akuntansi,

---

<sup>13</sup> **Loc. Cit**

kas meliputi uang dan alat pembayaran lain yang disamakan dengan uang atau pembayaran untuk mempermudah jalannya sebuah transaksi. Disamping itu juga kas merupakan aktiva yang mudah diselewengkan dan digunakan dengan tidak semestinya oleh karyawan, karena kas merupakan aktiva yang paling mudah dipindah tangankan. Banyak transaksi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Tidak hanya terbatas pada uang tunai saja yang tersedia di perusahaan, melainkan meliputi semua aktiva yang dapat dipergunakan dengan segera untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Menurut Hamonangan Siallagan: **”Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.”**<sup>14</sup>

Menurut Darsono dan Ari Purwanti mengemukakan bahwa: **”Kas terdiri dari mata uang (*current*), giro, dan rekening koran di bank (*bank deposit*), perusahaan atau perseorangan menyimpan uang tunai (kas) untuk motif transaksi, motif pencegahan, dan motif spekulasi ”**<sup>15</sup>

Menurut Rahmat Hidayat Lubis dan Ratna Sari Dewi mengemukakan bahwa: **”Kas adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lain dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran sah dan dapat diambil setiap saat.”**<sup>16</sup>

### 2.2.2 Komposisi Kas

---

<sup>14</sup>Hamonangan Siallagan: **Akuntansi Perbankan**, Edisi-1: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2019, hal. 73

<sup>15</sup>Darsono dan Ari Purnaati, **Penganggaran Perusahaan**, Edisi Keempat: UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2019, hal .26

<sup>16</sup>Rahmat Hidayat Lubis dan Ratna Sari Dewi: **Akuntansi Keuangan Menengah I**, Edisi Pertama: Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017

Kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain-lain yang dapat diambil sewaktu-waktu.

Menurut Yayan Pudin Shatu komposisi kas adalah sebagai berikut:

1. **Cek Mundur (*Post datet checks*) tetap dicatat sebagai piutang sebagai tanggal dimana cek dapat diuangkan. Cek mundur termasuk dalam piutang.**
2. **Surat-surat berharga seperti saham-saham dan obligasi mungkin dapat segera dijual dan menjadi uang tunai, tetapi sebelum dijual surat-surat berharga itu tidak termasuk kelompok kas. Sebelum dijual surat berharga tetap dilaporkan sebagai investasi jangka pendek.**
3. **Simpanan dalam bank luar negeri menimbulkan suatu masalah khusus karena mata uang yang berbeda. Oleh karena itu, simpanan diluar negeri harus dikurskan dalam rupiah. Sering kali simpanan-simpanan dibank luar negeri tidak dapat diambil sewaktu-waktu, oleh karena itu dalam neraca simpanan tapi akan dilaporkan terpisah.**
4. **Uang kas yang dibatasi penggunaannya, biasanya dalam bentuk dana, tidak dimasukkan dalam kas tetapi dilaporkan terpisah sebagai dana. Jika penggunaannya masih dalam waktu satu tahun, maka termasuk dalam kelompok aktiva lancar, tetapi jika tidak dapat digunakan dalam waktu satu tahun, maka dilaporkan dalam kelompok aktiva tidak lancar.<sup>17</sup>**

Untuk dapat digolongkan sebagai kas biasanya dibatasi dengan “diterima sebagai setoran oleh bank dengan nilai nominal”, sehingga elemen-elemen yang tidak diterima sebagai setoran oleh bank dengan nilai nominal tidak dikelompokkan, dalam kas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk

---

<sup>17</sup>Yayan Pudin Shatu: **Kuasai Detail Akuntansi Perkantoran**, Lembar Langit Indonesia, 2016, hal. 27

pelunasan utang dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya.

### **2.3 Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas**

Sistem pengendalian intern adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi yang berkaitan dengan sumber pemasukan kas yang diterima perusahaan.

Penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dan penerimaan kas dari piutang. Namun penerimaan kas tidak hanya tergantung oleh kedua itu saja, tergantung dari bidang usaha perusahaan masing-masing. Dalam PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara sumber penerimaan kas berasal dari anggaran PLN, APBN, Pinjaman, dan Subsidi Pemerintah.

Pengendalian intern penerimaan kas merupakan pengendalian intern yang memisahkan fungsi antara pencatatan dan pengurusan kas yang jelas, dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang kemungkinan terjadi di perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern maka kas dalam perusahaan tidak dapat digelapkan oleh siapapun.

Beberapa prinsip pengendalian intern penerimaan kas yang dapat dijadikan pedoman adalah sebagai berikut (AL. Haryono);

- 1. Penetapan tanggungjawab**
- 2. Pemisahan tugas**
- 3. Prosedur dokumentasi**
- 4. Pengawasan fisik**
- 5. Verifikasi internal secara independen**

## 6. Pengendalian sumber daya manusia<sup>18</sup>

Dari pernyataan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan.

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian – penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 1. Daftar Tabel Penelitian**

No	Nama	Judul	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian Data
1	Nur Aisyah	Sistem Pengendalian Intern atas fungsi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada PT Sarana Hachery Abadi	Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu, Sistem pengendalian intern atas fungsi penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Sarana Hachery Abadi dinyatakan telah berjalan sesuai dengan sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas menurut Mulyadi (2016). Hal ini dapat dilihat dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang bermutu yang telah sesuai
2	Hilaatu Mila Kusnia, Ahmad Syaiful Hidayat	Sistem Pengendalian Intern penerimaan kas (Studi Kasus pada PT Serkartika Jati Rencana)	Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu, semua sistem pengendalian kas intern yang diterapkan oleh CV Serkartika Jati Rencana telah terbukti efektif dengan formulir yang

<sup>18</sup> Al. Haryono Jusup, **Dasar-Dasar Akuntansi**, Jilid Dua, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua: BPSTIE YKPN, Yogyakarta, 2014, Hal 6.

	Anwar, mudrig Mudrifah			telah dicetak bernomor, setiap dokumen penjualan telah di cetak rangkap dua dan dilakukan pengecekan sekala berkala. Namun terdapat beberapa sistem pengendalian intern penerimaan kas yang masih belum efektif
3	Agus Nurul Hudananth	Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Atas Penjualan Tunai Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Bayan	Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada KPRI Sejahtera Bayan belum diterapkan sesuai prosedur dengan menggunakan dokumen dan catatan akuntansi untuk merekap transaksi karena hanya menggunakan daftar penerimaan kas harian dan kartu persediaan.
4	Thalita Syafira	Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT Perjaminan Jamkrindo Syariah Medan	Deskriptif	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti yaitu, sistem pencatatan menggunakan dokumen su mber dan dokumen pendukung yang mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang dan praktek yang sehat dilakukan dengan melakukan pengendalian secara langsung maupun tidak langsung, dan para prosedur pengendalian penerimaan kas, perusahaan telah melengkapi prosedur dengan dokumen yang telah diverifikasi, dan penerimaan kas mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dan secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik kas yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan akuntansi.

*Sumber: Jurnal Akuntansi & Skripsi*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara yang berkedudukan di Jl. K.L.Yos Sudarso No. 284, Medan, Sumatera Utara 20115, Indonesia. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara adalah perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan, yang kegiatannya adalah membangkitkan, menyalurkan, dan mendistribusikan tenaga listrik bagi penerangan kehidupan masyarakat.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengelolaan data pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif, dan lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel. Menurut Sugiyono bahwa:

**“Metode Penelitian Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”<sup>19</sup>**

Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*, hal.7



### 3.3 Jenis data penelitian

Ada dua jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah dari sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, mengenai kebijakan dalam penerimaan kas. Data primer diperoleh dari bagian keuangan perusahaan, terutama mengenai unsur- unsur dan prosedur yang digunakan dalam pengendalian intern penerimaan kas.
2. Data sekunder adalah data penelitian yang telah terdokumentasi yang diperoleh dari perusahaan. Dalam penelitian data yang diperlukan adalah data mengenai sejarah singkat PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Struktur Organisasi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, *Flowcart*, dokumentasi dan prosedur penerimaan kas di PT PLN ( Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono bahwa:

**“Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila**

**penelitian ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.”<sup>20</sup>**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan kas pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara dan dilakukan secara langsung kepada narasumber yaitu pada bagian keuangan perusahaan.

## **2. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan metode dokumentasi untuk pendukung pengolahan data. Dengan memperoleh catatan dan dokumentasi yang dimiliki perusahaan terutama pada bagian-bagian yang terkait dalam sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara. Dalam penelitian ini data dokumentasi terkait adalah prosedur kerja operasional penerimaan ka, struktur organisasi, dan sejarah perusahaan.

## **3. Observasi**

Menurut Mei Hotma Mariati Munte Bahwa:

**“Observasi (*Observation*) yaitu pengamatan langsung atas suatu kegiatan yang sedang dilakukan di mana pada waktu observasi dilakukan, analisis sistem juga dapat ikut berpartisipasi dengan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut,”<sup>21</sup>**

---

<sup>20</sup> **Ibid**, hal.137

<sup>21</sup> Mei Hotma Munte, **Op. Cit.**, hal.119

Observasi dalam penelitian dilakukan dengan cara pengamatan kegiatan pelaksanaan perusahaan dan melihat secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian. Objek yang diamati adalah sistem pengendalian intern terhadap penerimaan kas pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara.

#### 4. Studi Kepustakaan

Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang memanfaatkan buku atau literature sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini dan dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang berhubungan erat dengan topik pembahasan.

#### 3.5 Metode Analisis Data

##### 1. Metode analisis deskriptif

Menurut Sugiyono “**Deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam**”<sup>22</sup>. Sehingga dengan metode ini mampu mengungkapkan Sistem Penendalian Intern Penerimaan Kas Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara.

##### 2. Metode Analisis Komparatif

---

<sup>22</sup>Sugiyono, *Op.Cit.*, hal.147

Metode analisis komparatif adalah metode analisis yang bersifat perbandingan. Yang digunakan untuk membandingkan teori mengenai sistem pengendalian intern atas penerimaan kas secara umum dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan kas yang diterapkan pada PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara